

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Yunita¹, Try Adhi Bangsawan², Eli Apud Saepudin³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa
Email: yn44306@gmail.com

Abstrak

Studi ini memiliki tujuan yaitu melihat bagaimana nilai-nilai good governance diterapkan di pengendalian administrasi di sekretariat daerah kota Serang. Fokus pada penelitian mencakup dampak penerapan terhadap efisiensi dan akuntabilitas serta faktor pendukung dan penghambatnya. Studi deskriptif kualitatif dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dalam studi ini. Teori Mardiasmo (2009) digunakan sebagai kerangka analisis, yang menekankan tiga indikator utama good governance: transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi mulai diterapkan melalui keterbukaan informasi administratif, meski akses masyarakat, masih terbatas. Akuntabilitas telah diwujudkan dalam pelaporan kinerja, namun belum sepenuhnya optimal karena pelaporan yang kurang lengkap dan tepat waktu. Efisiensi dan efektivitas terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi informasi. Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan dan ketersediaan regulasi, sedangkan hambatan meliputi budaya kerja yang belum akuntabel dan lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, digitalisasi administrasi, dan peningkatan budaya kerjayang akuntabel untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih tertib dan transparan.

Kata kunci: Good Governance, Pengendalian Administrasi, Sekretariat Daerah, Kota Serang

Abstract

This study has the objective of seeing how good governance values are applied in administrative control in the regional secretariat of Serang city. The focus on research includes the impact of implementation on efficiency and accountability as well as its supporting and inhibiting factors. Qualitative descriptive studies by means of interviews, observations, and documentation are the ways to collect data in this study. Mardiasmo's theory (2009) is used as an analytical framework, which emphasizes three main indicators of good governance: transparency, accountability, efficiency and effectiveness. The results of this study also show that the principle of transparency has begun to be applied through the disclosure of administrative information, although public access is still limited. Accountability has been realized in performance reporting, but it is not fully optimal due to incomplete and timely reporting. Efficiency and effectiveness are hampered by limited human resources, budgets, and information technology. The main supporting factors are the commitment of the leadership and the availability of regulations, while obstacles include an unaccountable work culture and weak internal supervision. This study recommends strengthening human resource capacity, digitizing administration, and improving an accountable work culture to realize a more orderly and transparent government system.

Keywords: Good Governance, Administrative Control, Regional Secretariat, Serang City

PENDAHULUAN

Istilah sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) telah populer yaitu sejak runtuhnya rezim Orde Baru lalu digantikan oleh era reformasi. Lahirnya konsep ini yang dilatarbelakangi oleh lemahnya kinerja pemerintah dalam mengelola urusan publik. Good

Governance menjadi cita-cita seluruh warga negara karena pemerintahan yang berkualitas mampu menjamin keteraturan kehidupan berbangsa yang lebih baik serta mewujudkan sistem pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan sesuai dengan keinginan masyarakat. (Darmi, 2023).

Permen No 10 Tahun 2000 tentang makna *Good governance* (pemerintahan yang baik) ialah sistem pemerintahan yang membangun suatu proses dengan keberhasilan penerapan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, serta supremasi hukum mencerminkan prinsip yang bisa diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak diluar konreks undang-undang. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintahan di indonesia terbagi atas pemerintahan pusat dan daerah. Adapun Undang-undang nomor 30 tahun 2014 mengatur tindakan serta proses pengambilan keputusan oleh badan dan pejabat pemerinthaan yang memiliki kewenangan. (Pemerintahan et al., 2014).

Akhir-akhir ini, proses yang terjadi di pemerintahan publik, terutama di sekretariat daerah kota Serang, dianggap penting untuk menilai penerapan Good Governance. Di beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, muncul kekhawatiran akibat kegagalan tatakelola perusahaan seperti yang terjadi pada kasus enron dan world com. Sementara itu, Australia juga menghadapi permasalahan serupa, salah satunya kegagalan dalam pengelolaan valuta asing pada National Australia Bank yang mencerminkan lemahnya sistem pengendalian perusahaan di negara tersebut (Muljo et al., 2014).

Sekretariat Daerah Kota Serang adalah perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam mengoordinasikan, penyusunan kebijakan, dan pelayanan administrasi kepada kepala daerah terutama disekretarit daerah, memainkan fungsi signifikan untuk menjamin sistem pengelolaan pemerintah yang baik. Namun, ketika praktiknya, implementasi prinsip *Good governance* dalam lingkungan Sekretariat Daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan administratif, hingga lemahnya sistem pengawasan internal. Berbagai hasil evaluasi dan laporan audit dari inspektorat maupun lembaga eksternal menunjukkan masih terdapat celah dalam pelaksanaan administrasi yang efisien dan akuntabel di lingkungan Pemerintah sekretariat daerah Kota Serang. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh implementasi prinsip ini benar-benar dilaksanakan di sistem pengelolaan

administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penerapan nilai-nilai tersebut.

Pemerintahan yang terbuka dan kredibel sangat bergantung pada penerapan prinsip sistem pengelolaan pemerintahan yang ideal. Otoritas daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah yang memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi dan pengendalian kebijakan daerah.

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi menyebabkan lambannya pelayanan dan rendahnya efisiensi kerja. Sistem administrasi yang masih dilakukan secara manual menimbulkan hambatan dalam koordinasi, penyimpanan data, dan akses informasi. Sebaliknya, kualitas dan jumlah sumber daya manusia menjadi masalah utama. Masih terdapat aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Kondisi ini menjadi kendala besar dalam menciptakan sistem penyelenggaraan otoritas daerah yang berdasarkan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis tentang sejauh mana nilai-nilai tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor penghambatnya diidentifikasi, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan SDM. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang.

Tanpa dukungan teknologi, proses administrasi seperti pencatatan, pengarsipan, dan distribusi dokumen menjadi lambat dan memakan waktu. Pengelolaan data secara manual lebih rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan penulisan, penghitungan, atau kehilangan data penting dan sangat sulit untuk melacak jejak kerja dan akuntabilitas tanpa sistem digital yang terdokumentasi dengan baik. Proses manual biasanya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, kertas, dan ruang penyimpanan, yang semuanya menambah beban biaya

Dalam konteks ini, penerapan *Good Governance* di Sekretariat Daerah Kota Serang menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Dan juga untuk memastikan implementasi landasan *good governance* tersebut telah diterapkan sejauh mana. Atas dasar hal tersebut, studi ini difokuskan untuk memeriksa sejauh apa penerapan Good Governance diterapkan di Sekretariat Daerah Kota Serang dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sekretariat

Daerah Kota Serang Lebih Terfokus Pada Pengendalian Administrasi, Karena Sebagai Acuan utama untuk mempermudah segala kegiatan dan mempermudah masyarakat untuk menyalurkan saran dan prasarana terhadap pemerintah dan juga mempermudah pemerintah untuk menjalankan kegiatan yang bersikap ugent.

Dalam era reformasi biokrasi dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi, pengendalian administrasi yang terbuka, kredibel, dan berbasis kinerja menjadi kebutuhan mendesak. belum optimalnya pengamalan nilai-nilai *good governance* dalam pengendalian administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih adanya tumpang tindih kewenangan, proses birokrasi yang lambat, serta kurang transparannya pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi. Selain itu, penerapan *good governance* juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi internal seperti kualitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan, maupun dari sisi eksternal seperti keterbatasan anggaran dan dukungan teknologi informasi, yang secara keseluruhan menjadi faktor penghambat dalam upaya mewujudkan pengendalian pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengendalian administrasi di sekretariat daerah kota serang harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem administrasi digital, termasuk menjalankan penerapan *Good governance* pada pengendalian administrasi di sekretariat daerah kota serang agar pengendalian berjalan dengan baik dan optimal.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya dilakukan analisis yang mendalam terhadap sejauh mana nilai-nilai *good governance* telah diterapkan dalam pengendalian administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi yang relevan untuk mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini, diharapkan dapat menguraikan secara jelas nilai-nilai *Good governance* dalam pengendalian administrasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk mewujudkan pengendalian pemerintahan daerah yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam studi ini. Moleong (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Sebaliknya, Nazir (2014) mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk secara sistematis dan akurat menggambarkan fakta dan hubungan fenomena. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengendalian administrasi.

Lokasi observasi/penelitian adalah Sekretariat Daerah Kota Serang yang dipilih secara purposif karena memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi kebijakan dan administrasi daerah. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, yaitu April hingga Juni 2025. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana dijelaskan Patton (2002), dengan melibatkan Sekretaris Daerah, pejabat struktural, staf administrasi, serta bagian humas yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian.

Data diperoleh yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendapat Nasution dalam Sugiyono (2018), observasi penting karena peneliti dapat menyaksikan secara empiris fenomena yang terjadi tersebut lalu menentukan objek yang akan diamati (misalnya aktivitas pegawai, proses pelayanan atau suasana kantor lokasi penelitian tersebut, sementara Esterberg (2002) menyebut wawancara sebagai cara menggali informasi melalui percakapan terarah dan juga menyusun pedoman wawancara (daftar pertanyaan sesuai variabel penelitian). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan SOP yang relevan dan juga menganalisis isi dokumen untuk mendukung data observasi dan wawancara.

Untuk melakukan analisis data, model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) ialah model yang digunakan dalam studi ini, meliputi penyederhanaan data, penyusunan data, dan penentuan temuan utama. Menurut Denzin dari Moleong (2017), teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menjaga keabsahan data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Melalui metode ini, studi diharapkan mampu memberikan gambaran lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Good Governance di Sekretariat Kota Serang

Sekretariat Daerah Kota Serang sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam koordinasi, penyusunan kebijakan, dan pelayanan administrasi kepada kepala daerah, yaitu memegang peranan penting tujuannya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Kegiatan Wawancara bersama Informan Penelitian, peneliti juga menggunakan lembar wawancara secara tersusun menggunakan Teori Good Governance Mardiasmo 2009. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan 3 indikator ialah: (1) akuntabilitas (2) transparansi (3) efektivitas dan efisiensi. Ketiga indikator tersebut dipilih karena merupakan unsur kunci ketika pelaksanaan nilai-nilai *good governance* yang relevan dengan konteks pengendalian administrasi di Sekretariat Daerah Kota Serang.

Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana aparatur Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan maupun masyarakat. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang proses administrasi, kebijakan, maupun layanan yang diberikan. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi menilai sejauh mana kegiatan administrasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan dengan tepat sesuai dengan sasaran dengan memanfaatkan sumber daya dengan optimal.

1. Akuntabilitas

Pendapat dari Mardiasmo (2009), akuntabilitas berarti bahwa pengelola yang diberikan kepercayaan (*agent*) bertanggung jawab mempertanggungjawabkan, menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan operasi yang dilakukan oleh otoritas yang memberikan tanggungjawab (*principal*), yang berhak serta berwenang memperoleh atau menuntut pertanggungjawaban.

Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kota Serang ditunjukkan dengan kewajiban setiap perangkat daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara rinci, terukur, dan terdokumentasi lengkap. Laporan ini memuat capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan dokumentasi kegiatan yang menjadi dasar evaluasi oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses administrasi, meskipun pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat struktural sesuai bidang masing-masing. Akuntabilitas juga diwujudkan melalui mekanisme pelaporan kinerja pegawai (SKP) secara bulanan melalui aplikasi e-Kinerja, yang memungkinkan penilaian kedisiplinan dan capaian kerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban yang diterapkan tidak hanya administratif tetapi juga menekankan pada pengawasan internal.

2. Transparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi dapat didefinisikan sebagai tingkat keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi setiap kebijakan yang diambil."

Transparansi diterapkan dengan memastikan keterbukaan informasi publik terkait kebijakan, program kerja, maupun penggunaan anggaran. Sekretariat Daerah melibatkan Sekretaris Daerah dalam seluruh proses pengambilan keputusan agar tidak ada kebijakan yang diambil tanpa sepengetahuannya. Selain itu, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka melalui forum resmi seperti rapat koordinasi dan Musrenbang yang bersifat partisipatif.

Informasi hasil keputusan disampaikan melalui saluran resmi, antara lain website pemerintah, media sosial, papan pengumuman, serta siaran pers yang bekerja sama dengan media massa. Kehadiran Pejabat, Pengelola Informasi, dan Dokumentasi (PPID) juga memperkuat akses masyarakat tentang fakta dan keterangan yaitu serasi dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui cara ini, masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan.

3. Efisiensi dan efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) Pencapaian efisiensi berarti memperoleh hasil (output) yang optimal dengan menggunakan jumlah sumber daya (input) tertentu, atau sebaliknya, menggunakan input yang seminimal mungkin yaitu bertujuan untuk menghasilkan output yang telah ditentukan. Sementara itu, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program dapat menggapai output yang sesuai dengan sasaranyang sudah direncanakan.

Efektivitas dan efisiensi tercermin dari adanya sistem pelaporan kinerja administrasi yang terstruktur, baik melalui aplikasi digital maupun laporan manual, yang kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi. Pelaksanaan kegiatan administrasi sebagian besar berjalan sesuai jadwal dan target, meskipun kendala teknis seperti keterlambatan disposisi, hambatan sistem digital, serta koordinasi antarbagian masih menjadi tantangan.

Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai yang difasilitasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), baik berupa diklat teknis, manajerial, maupun pengembangan kompetensi berbasis digital. Selain itu, perencanaan kegiatan administrasi disusun secara sistematis melalui rapat internal, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), beserta penilaian berkala untuk memastikan optimalisasi sumber daya. Dengan demikian, Sekretariat Daerah berupaya membangun pengendalian administrasi yang efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan umum.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang memengaruhi implementasi nilai-nilai good governance di Sekretariat Daerah Kota Serang. Faktor utama yang mendorong penerapan prinsip ini adalah komitmen pimpinan yang cukup tinggi dalam mendorong terciptanya pengendalian administrasi yang lebih baik.

Kehadiran regulasi yang mengatur mekanisme kerja birokrasi juga menjadi landasan penting untuk memperkuat praktik akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas dalam layanan umum. Daripada itu juga, semangat sebagian aparatur dalam menjalankan tugas turut menjadi pendorong, meskipun belum merata di seluruh unit kerja.

Ketersediaan infrastruktur dasar administrasi, meskipun masih sederhana, juga telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan adanya faktor-faktor ini, penerapan prinsip good governance memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang ke arah yang tentunya lebih baik, terutama jika dikombinasikan dengan upaya peningkatan keunggulan, sumber daya manusia, dan pendayagunaan teknologi informasi.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan berbagai hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi nilai-nilai good governance di Sekretariat Daerah Kota Serang. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Dari sisi internal, keterbatasan anggaran untuk program-program inovasi dan digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu kendala utama.

Selain itu juga, jumlah dan kualitas sumber daya yang masih kurang, baik dalam hal keterampilan teknis, kemampuan kepemimpinan, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai good governance, turut memperlambat proses perbaikan pengendalian administrasi. Lemahnya pengawasan internal juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kedisiplinan aparatur, kurang terkontrolnya pengambilan keputusan, serta masih adanya peluang penyalahgunaan wewenang.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah sangat belum berjalan dengan baik dan juga pemanfaatan teknologi dan informasi ketika proses administrasi. Siste pengelolaan data yang digunakan masih bersifat manual dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik terbatas, proses pelayanan berjalan lambat, serta efisiensi kerja aparatur belum tercapai. Akibat dari berbagai hambatan tersebut, implementasi nilai-nilai good governance di Sekretariat Daerah Kota Serang masih berjalan kurang maksimal, yang terlihat dari lambatnya proses administrasi, pelayanan publik yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta akuntabilitas aparatur yang belum sepenuhnya terjaga.

KESIMPULAN

Studi ini memberikan bukti bahwa nilai-nilai good governance telah diterapkan di Sekretariat Daerah Kota Serang telah memiliki fondasi yang cukup kuat, terutama berkat adanya komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta semangat sebagian aparatur dalam menjalankan tugasnya. Ketersediaan infrastruktur dasar administrasi, meskipun masih

sederhana, juga turut mendorong tergapainya pengendalian yang optimal. Faktor-faktor ini menjadi modal penting bagi penguatan akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Keterbatasan anggaran, kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang belum optimal, lemahnya pengawasan internal, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi tantangan utama. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan penerapan prinsip good governance belum berjalan maksimal, yang tercermin dari masih lambatnya proses administrasi, kurang responsifnya pelayanan publik, serta akuntabilitas aparatur yang belum sepenuhnya terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmi, T. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance. In *Jurnal Administrasi Fisip Universitas Muhammadiyah Bengkulu: Vol. Volume 4* (Issue Nomer 2).
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015* (Vol. 5, Issue 3).
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2020). *Buku Ajar*.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. In *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Muljo, H. H., Wicaksono, A., & Riantono, I. E. (2014). Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. *Binus Business Review*, 5(1), 91. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1199>
- Mote, S. (2020). Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 1–10. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.953>
- Nurbadaliah, S., & Rijali, S. (2023). Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung. *Japb*, 6(1), 275–284.
- Rindayati, E., Putri, C. A. D., & Damariswara, R. (2022). Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.53624/ptk.v3i1.104>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Nilai-nilai Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Rudini, Moh & Melinda, M. (2020). Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa Sdn Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2), 122–131
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kecemasan Remaja Putri Menghadapi Menarche di SMP Negeri 13 Kota Jambi <http://jab.stikba.ac.id/index.php/jab/article/view/159>. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, 5(3), 248–253.
- Tabrani. (2023). Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam berbagai Aspek Tabrani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 318–327.
- Ummah, M. S. (2019). Fenomenakebijakan publik. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484> SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292